

ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan



ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan



@adalahuijkt



buletin.adalah

Sistem Pemerintahan Presidensial Negara Federasi Rusia

Nur Rohim Yunus*

Rusia dengan nama resmi Rossiyskaya Federatsiya (Russian Federation) adalah negara terluas di dunia yang wilayahnya terbentang dari Eropa Timur hingga Asia bagian Utara. Luas wilayahnya hampir sama dengan luas planet Pluto yang mencapai 17.075.200 km (tujuh belas juta tujuh puluh lima ribu dua ratus) kilometer persegi.

Sebelum menjadi negara independen dari Uni Soviet, rezim Soviet menguasai Rusia dan Eropa Timur dengan sistem Sosialis. Pemimpin pertama Uni Soviet pada saat itu yaitu Vladimir Lenin membentuk negara Soviet berpaham sosialis komunis yang artinya tidak ada kepemilikan pribadi, dan segala kegiatan ekonomi masyarakat diatur dan diawasi oleh pemerintah pusat. Namun setelah runtuhnya Uni Soviet di tahun 1991, pemimpin Rusia saat itu lebih condong ke arah paham demokrasi, sehingga berubahlah haluan Rusia menjadi negara Federal berpaham Demokrasi Republik dan terbentuklah sistem pemerintahan Presidensial. Didalamnya Rusia menerapkan pembagian kekuasaan yang terpisah antara kekuasaan Yudikatif, eksekutif, dan legislatif dengan tugas pokok pada masing-masing yang berbeda.

Rusia resmi menjadi negara berbentuk Federasi Rusia yang disahkan dalam Konstitusi Federasi



Rusia pada tanggal 12 Desember 1993. Rusia mendeklarasikan diri sebagai negara hukum yang berbentuk federasi dengan sistem pemerintahan presidensial (Fahrurodji, 2005: 194).

Sistem pemerintahan Rusia adalah Presidensial, artinya kekuasaan presiden berada penuh pada diri seorang presiden, baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Kedudukan presiden dalam hal ini mutlak sebagai eksekutif yang tidak bertanggungjawab kepada

parlemen atau badan perwakilan rakyat (Maggalatung, 2013: 87).

Kekuasaan tertinggi dalam Sistem Pemerintahan di Rusia memang terbagi menjadi dua, yaitu pada Presiden dan Perdana Menteri, yang bila merujuk pada teori Ilmu Negara seharusnya sistem pemerintahan Rusia demikian disebut dengan Sistem Pemerintahan Parlemeter, karena kekuasaan eksekutif ada pada Presiden dan Perdana Menteri. Namun hal unik yang membedakan adalah Presiden memiliki kekuasaan dominan dibandingkan

Perdana Menteri. Seharusnya kedudukan Perdana Menteri dalam sistem parlementer menempatkannya sebagai Kepala Pemerintahan yang memegang mutlak kendali negara, baik kebijakan kedalam maupun keluar, sedang Presiden hanya sebatas kepala negara yang menjadi simbol kedaulatan negara.

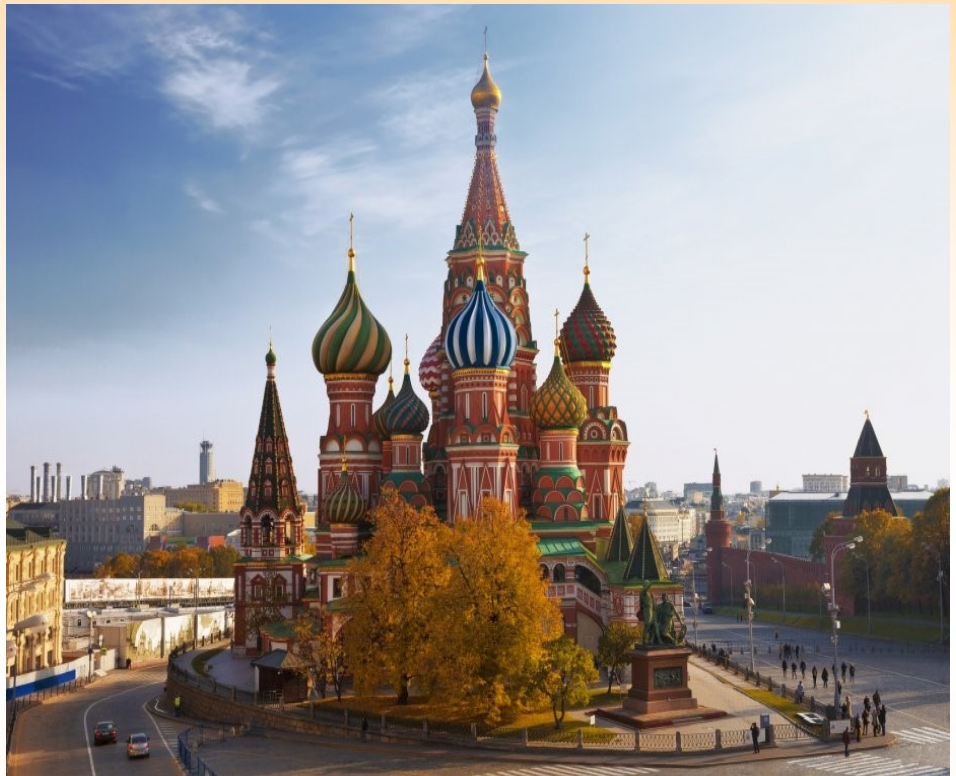
Di Rusia kekuasaan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri hanya pada ranah kewenangan domestik saja, misalnya kebijakan sosial kependudukan, dan pengaturan mengenai birokrasi dalam pemerintahan. Perdana Menteri di Rusia bukanlah kepala pemerintahan sebagaimana teori Sistem Pemerintahan Parlementer. Tetapi Perdana Menteri di Rusia hampir sama kedudukannya sebatas pembantu presiden atau sebagai wakil presiden di ranah pemerintahan dalam negeri belaka, selain memang konstitusi Rusia pasca amandemen 1993 sudah meniadakan kedudukan wakil presiden. Artinya Presiden menjadi satu-satunya penguasa tertinggi negara yang dipilih rakyat.

Perdana Menteri diangkat oleh presiden dengan persetujuan Parlemen, sedang para Menteri diangkat berdasarkan usulan Perdana Menteri, kecuali menteri keamanan negara yang pencalonannya harus mendapatkan persetujuan Duma Negara (Legislatif). Presiden sebagai kepala negara memiliki kewenangan yang amat besar dalam berbagai isu yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan, dan politik luar negeri. Presiden juga berwenang untuk mengeluarkan ketentuan darurat, termasuk yang memiliki kemungkinan ekstra konstitusional (Saragih, 2008: x).

Makna kewenangan ekstra konstitusional disini adalah kewenangan untuk dapat mengusulkan perubahan konstitusi. Seperti dalam perubahan konstitusi 2008 tentang masa jabatan presiden yang dahulu hanya empat tahun, tetapi akhirnya diubah atas usul presiden menjadi enam tahun dan paling lama menjabat selama dua periode.

Perubahan tersebut terjadi pada masa Presiden

Dmitri Medvedev yang menggantikan Vladimir Putin yang telah menjabat dua periode selama delapan tahun. Dmitri Medvedev merupakan orang kepercayaan Putin yang akhirnya menjadi presiden dan mengangkat Putin menjadi Perdana Menteri. Namun dengan permainan politik yang luar biasa, akhirnya pemilu kembali menempatkan Putin sebagai Presiden hingga saat ini. Artinya dua periode awal sebagai presiden dijedah dengan kedudukan sebagai Perdana Menteri, yang akhirnya kembali menduduki jabatan Presiden di tahun 2012 hingga sekarang.[]



Pustaka Acuan:

- *Penulis adalah Sekjen Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fahrurroddi. *Rusia Baru Menuju Demokrasi Pengantar Sejarah dan Latar Belakang Budayanya*, Edisi: 1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Maggalatung, A Salman. & Nur Rohim Yunus, *Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara*, Bandung: Fajar Media, 2013.
- Saragih, Simon. *Bangkitnya Rusia: Peran Putin dan Eks KGB*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008.

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nur Rohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Indah Furba, Hasin Abdullah. **Setting & Layout:** Siti Anisaul Kamilah.